

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

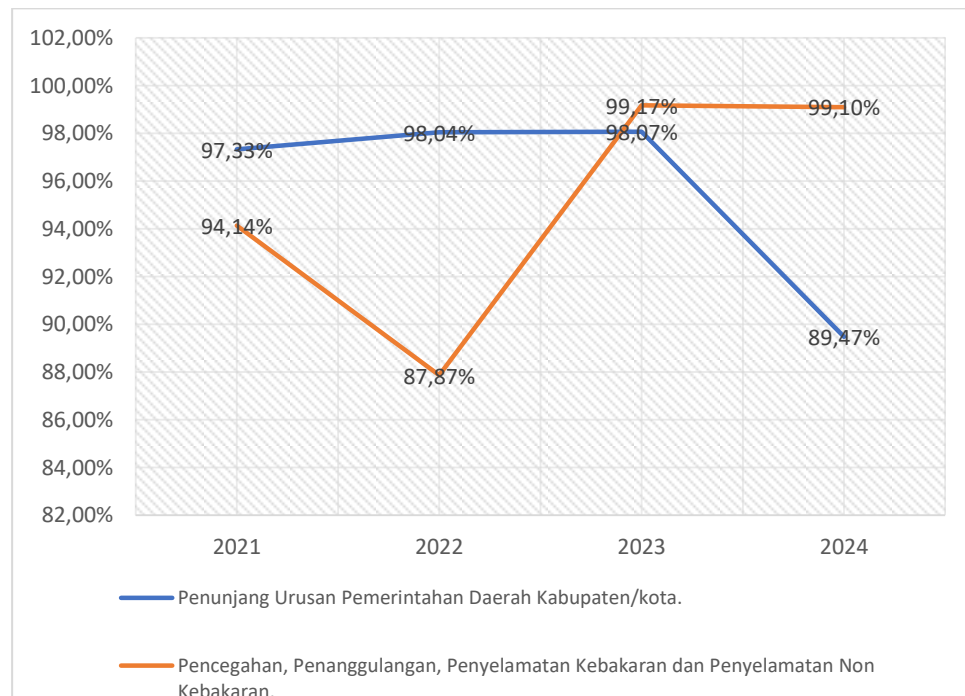
Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Pada umumnya organisasi sektor publik bisa dikatakan dengan baik apabila organisasi tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan mencapai tujuan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif (Tamara et al., 2020).

Sebagai bagian sektor publik lembaga pemerintah yang berperan dalam menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran dan bentuk keselamatan masyarakat lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut juga berkomitmen menjalankan tugas serta mencapai tujuan dengan ekonomis, efisien dan efektif. Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun program-program atau kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya.

Pelaksanaan program pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota tentu bergantung dengan cara pembiayaannya. Pembiayaan program yang direncanakan secara tepat melalui pengelolaan anggaran yang benar akan memastikan bahwa setiap kegiatan memperoleh alokasi dana yang memadai, digunakan sesuai peruntukannya, serta dilaksanakan secara tepat waktu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dan

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Berikut ini merupakan diagram realisasi program-program yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021-2024:

Gambar 1.1 Diagram Realisasi Tahun 2021-2024



Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa pada kedua program yang terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terjadi ketidak stabilan persentase realisasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021 ke 2022, terjadi penurunan persentase untuk program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, sedangkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 terjadi kenaikan persentase yang signifikan. Sementara itu untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dari tahun 2021 sampai 2023 tidak terlalu mengalami fluktuasi, namun di tahun 2024 terjadi penurunan persentase yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, diketahui bahwa pada tahun 2022 mengalami tunda bayar terhadap kewajiban dengan pihak ke-3. Pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini tentu menjadi sinyal adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran yang berdampak pada capaian kinerja instansi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pokok, kewenangan, dan fungsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mematuhi (Peraturan Presiden Nomor 29, 2014). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan dan digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*Good Government*).

Selama ini, evaluasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP cenderung lebih menekankan pada pencapaian indikator kinerja dan tingkat penyerapan anggaran, namun belum secara mendalam mengaitkan besarnya realisasi anggaran dengan efisiensi dan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP belum sepenuhnya mampu menjawab apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam konteks ini, konsep *Value For Money* dapat digunakan dengan melakukan pengukuran/ penilaian suatu kinerja dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio efektifitas apakah pada program yang telah dirancang sudah termasuk dalam kategori yang ekonomis, efisien serta efektifitas. Jika diamati sebenarnya konsep *Value For Money* bukanlah sesuatu yang baru, bahkan *Value For Money* merupakan salah satu prinsip yang sangat

penting dalam anggaran kinerja yang tertata dengan baik (Zulhelmy et al., 2022).

Penggunaan metode *Value For Money* untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti yang terlihat pada tabel 2.1, Beberapa penelitian pada beragam perangkat daerah, seperti pada BPBD Kabupaten Kampar serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, menemukan bahwa kinerja instansi umumnya telah memenuhi kriteria ekonomis dan efisien, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Penelitian lain pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar juga menunjukkan bahwa elemen efisiensi dan efektivitas belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, penelitian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang lebih baik karena kinerja keuangan telah memenuhi ketiga prinsip *Value For Money*. Sementara itu, penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat berbeda antarperiode, di mana terdapat tahun-tahun tertentu yang belum efisien atau belum efektif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi hasil penelitian yang mengindikasikan kemampuan *Value For Money* mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja instansi pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh terhadap kinerja pemerintah, serta sebagai dasar rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan dan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan capaian kinerja instansi pemerintah yang beragam, khususnya masih ditemukannya tingkat efisiensi dan efektivitas yang belum optimal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan menggunakan pendekatan *Value For Money*. Ketertarikan ini didasarkan pada adanya fluktuasi realisasi belanja dari tahun 2021-2014. Kondisi tersebut menandakan perlunya evaluasi kinerja yang tidak hanya

berfokus pada tingkat pencapaian target, tetapi juga pada kualitas pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, penerapan metode *Value For Money* diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mengenai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja belum optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi ekonomis?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah supaya :

1. Untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi ekonomis.
2. Untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efisiensi.

3. Untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021-2024 dengan menggunakan konsep *Value For Money* yang ditinjau dari segi efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money*.

2. Pada Instansi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan metode *Value For Money* pada Instansi

3. Bagi Penelitian Lanjutan

Dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sama ataupun sejenis, yang bisa digunakan sebagai pembandingan bagi penelitian lebih lanjut atas materi yang sama, dan sehingga penelitian bisa dapat di sempurnakan